

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT,
JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret



Disusun oleh :

Mufli Rumecko

NIM F1315132

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Skripsi

Disusun oleh:

Mufli Rumekso

NIM F1315132

Telah disetujui Pembimbing

Pada tanggal: Januari 2018

Pembimbing,



Dr. Muthmainah, M.Si., Ak.

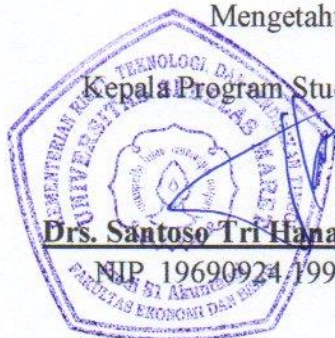
NIP. 19571124 198503 2 003

Mengetahui:

Kepala Program Studi Akuntansi

Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak.

NIP. 19690924 199402 1 001



HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Disusun oleh:

Mufli Rumekso

NIM F1315132

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal:

2018

1. **Drs. Wartono, M.Si., Ak, CPA, CA**
NIP 19600309 198702 1 001

(.....)
Ketua Tim Penguji

2. **Isna Putri Rahmawati, S.E., M.Sc., Ak.**
NIP 19890422 20130201

(.....)
Penguji

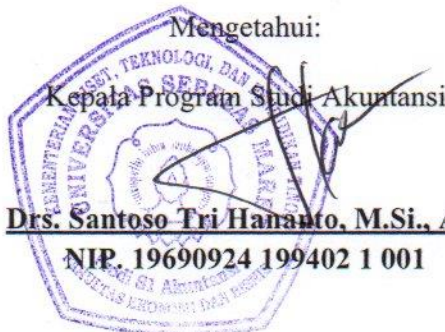
3. **Dr. Muthmainah, M.Si., Ak.**
NIP 19571124 198503 2 003

(.....)
Pembimbing

Mengetahui:

Kepala Program Studi Akuntansi

Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak.
NIP. 19690924 199402 1 001



HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Mufli Rumekso

NIM : F1315132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh atas skripsi tersebut.

Surakarta, Januari 2018



Yang menyatakan,

Mufli Rumekso

MOTTO

“Ketika Anda bersyukur, ketakutan hilang dan kelimpahan muncul.”

(Anthony Robbins)

“The best preparation for tomorrow is doing your best today”.

(H. Jackson Brown, Jr.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Tidak lupa penulis curahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu membimbing dan mendoakan sesuatu yang terbaik untuk anaknya.
2. Dr. Hunik Sri Runing, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Santosa Tri Hananto, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Dr. Muthmainah, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teman-teman STAR BPKP UNS Batch IV yang menjadi bagian rekan dan keluarga baru penulis selama tugas belajar.
7. Pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis masih menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang mendukung sangat penulis harapkan demi memperbaiki kesalahan penulis dan meningkatkan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang membaca dan mempelajarinya.

Wassalaamu'alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Surakarta, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
ABSTRAK	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN	
	HIPOTESIS	7
	2.1 Tinjauan Pustaka	7
	2.2 Pengembangan Hipotesis	12
	2.3 Model Penelitian	15
BAB III	METODE PENELITIAN	16
	3.1 Desain Penelitian	16
	3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	16
	3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	18
	3.4 Pengujian Data	21
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	27
	4.1 Hasil Analisis	27
	4.2 Pembahasan	49
BAB V	PENUTUP	53
	5.1 Simpulan	53
	5.2 Implikasi Penelitian	55
	5.3 Keterbatasan Penelitian	56
	5.4 Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Hasil Pemilihan Sampel	27
Tabel IV.2 Data Statistik Deskriptif	29
Tabel IV.3 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2013.....	31
Tabel IV.4 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Sumatera	32
Tabel IV.5 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Jawa	33
Tabel IV.6 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	33
Tabel IV.7 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Kalimantan dan Sulawesi ..	34
Tabel IV.8 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Maluku dan Papua	35
Tabel IV.9 Data Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2015 di Pulau Sumatera	36
Tabel IV.10 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2015 di Pulau Jawa	37
Tabel IV.11 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2015 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	38
Tabel IV.12 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2015 di Pulau Kalimantan	39
Tabel IV.13 Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2015 di Pulau Sulawesi	40

Tabel IV.14	Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Audit WTP Tahun 2014 di Pulau Maluku dan Papua	41
Tabel IV.15	Hasil Regresi Data Panel – Dependen skor EKPPD <i>Fixed Effect Model</i>	43
Tabel IV.16	Hasil Regresi Data Panel – Dependen skor EKPPD <i>Random Effect Model</i>	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	15

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Sampel Pengujian.....	63
Lampiran 2 Hasil Pengujian Statistik.....	72
Statistik Deskriptif	72
Hasil Regresi – <i>Fixed Effect Model</i>	72
Hasil Regresi – <i>Random Effect Model</i>	73
Hasil Regresi – <i>Hausman Test</i>	73
Lampiran 3 Penelitian Terdahulu.....	74

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
EKPPD	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKK	Indikator Kinerja Kunci
Inpres	Instruksi Presiden
Jo.	<i>Junto</i>
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
LAN-RI	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
Otda	Otonomi Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
REM	<i>Random Effect Model</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah

s.d.	sampai dengan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
STATA	<i>Statistics Data Analysis</i>
TA	Tahun Anggaran
TMP	Tidak Menyampaikan Pendapat
TW	Tidak Wajar
UU	Undang-Undang
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

DAFTAR ISTILAH

- Adversed Opinion* : Opini tidak wajar, opini audit yang diterbitkan oleh BPK, apabila LKPD mengandung salah saji material.
- Agent* : Pihak yang diberikan mandat dari pihak lain (*principal*), untuk melakukan semua kegiatan dalam kapasitas pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas : Pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Asimetri Informasi : Adanya ketimpangan informasi, dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak yang lain.
- Audited* : Telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor, dalam hal ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, biasanya pada laporan keuangan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.
- Checks and Balances* : Pemisahan kekuasaan, dimana adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.
- Crossection* : Jenis data satu dimensi kumpulan data dengan mengamati banyak hal pada waktu yang sama, atau tanpa memperhatikan perbedaan waktu.

Desentralisasi	: Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/otonom berdasarkan asas otonomi.
Diferensiasi Fungsional	: Pembagian kerja, menjadi sub unit. Terjadi karena adanya pembagian kerja yang berbeda-beda di suatu lembaga.
<i>Disclamer of Opinion</i>	: Opini tidak menyampaikan pendapat, opini audit yang diterbitkan oleh BPK, apabila auditor tidak bisa menyakini apakah LKPD wajar atau tidak.
Entitas Akuntansi	: Unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.
Entitas Pelaporan	: Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
<i>Good Governance</i>	: Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dalam proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya bertanggung jawab secara bersama.
Inkonsistensi	: Berubah-ubah, bertentangan, tidak serasi.
<i>Kurtosis</i>	: Derajat keruncingan pada suatu distribusi normal.
<i>Mean</i>	: Nilai rata-rata dari beberapa data.

- Monitoring* : Suatu aktifitas (pemantauan) yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
- Opini Audit : Suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
- Otonomi daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Principal* : Pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan semua kegiatan dalam kapasitas pengambilan keputusan.
- Prioritas Bidang : Pedoman untuk arah pembangunan yang diutamakan dalam suatu bidang.
- Prioritas Nasional : Pedoman untuk arah pembangunan yang mencakup nasional.
- Purposive Sampling* : Teknik untuk menentukan suatu sampel penelitian melalui pertimbangan tertentu, agar memperoleh informasi yang lebih representatif.

- Qualified Opinion* : Opini wajar dengan pengecualian, opini audit yang diterbitkan oleh BPK, apabila sebagian besar informasi dalam LKPD bebas dari salah saji material, kecuali untuk item tertentu yang mengalami pengecualian
- Range* : Selisih antara harga maksimum dengan harga minimum dari sebuah instrumen pada periode tertentu.
- RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pemerintah setiap lima tahun. Tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Situs Portal : Alamat *web* yang menyediakan kemampuan tertentu untuk menuruti selera para pengunjung yang disertai dengan kemampuan tertentu.
- Skewness* : Derajat ketidaksimetrisan pada suatu distribusi normal.
- Sum* : Hasil penjumlahan data. Jumlah nilai data pada *range* tertentu.
- Unqualified Opinion* : Opini wajar tanpa pengecualian, opini audit yang diterbitkan oleh BPK, apabila LKPD memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

MUFLI RUMEKSO
F1315132

Penelitian ini, bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, jumlah SKPD, dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 1.296 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data panel. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: ukuran pemerintah daerah, opini audit, jumlah SKPD, belanja modal, kinerja pemerintah daerah.

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENTS' SIZE, THE AUDIT OPINION, THE NUMBER OF SKPD, AND THE CAPITAL EXPENDITURE TOWARD LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE

MUFLI RUMEKSO
F1315132

This research aims to determine and get empirical evidence the effect of local governments' size, the audit opinion, the number of SKPD, and the capital expenditure toward local government performance. The performance of local governments is measured by the score of EKPPD from the Ministry of Home Affairs .

The population of this research is the local government in Indonesia during 2013-2015. The sampels of this research are collected using purposive sampling method. There are 1.296 sampels that match with the criteria. This reseach is using secondary data that obtained from Local Government Performance Report (LPPD) and Local Government Financial Statement (LKPD).

The tests of hypothesis in this research use multiple regression analysis by panel data. The results of multiple regression analysis show that the local governments' size and the capital expenditure are unaffected the local government performance, whereas the opinion audit and the number of SKPD are positively affected it.

Keywords: *the local governments' size, the opinion audit, the number of SKPD, the capital expenditure, the local government performance.*